

**PENGARUH RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG DI TINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
TAHUN 2009-2018**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi atau S.E
Dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

EKA FITRI FEBRIANTI

NPM : 1551010031

Jurusan : Ekonomi Islam



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**PENGARUH RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG DI TINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
TAHUN 2009-2018**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi atau S.E
Dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

EKA FITRI FEBRIANTI

NPM : 1551010031

Jurusan : Ekonomi Islam

Pembimbing 1 : Budimansyah, S.Th.I.,M.Kom.I
Pembimbing II : Femei Purnamasari, S.E.,M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Pemerintah dituntut dalam kemandiriannya dalam mengurus daerahnya sendiri dan mengenai segala urusan pendanaan untuk daerahnya, baik itu dalam penanganan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan pemerintah. Setiap daerah memiliki potensi masing-masing yang dapat digali oleh pemerintah daerah. Seperti di Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka pemerintah harus menggali potensi-potensi yang ada. Seperti Retribusi Jasa Umum yang berada dibawah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana pengaruh ketiga retribusi tersebut terhadap pendapatan asli daerah tahun 2009-2018, baik secara parsial maupun simultan, dan bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap Pendapatan Asli Daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Asli Daerah. Pengumpulan data sekunder menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan evIEWS 9. Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Persampahan/Kebersihan (X1) terhadap PAD (Y), dengan hasil pengujian t-hitung sebesar $(-0.657248) < (2,36462)$, dan nilai prob. sebesar $0,5354 > 0,05$, artinya Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Persampahan/kebersihan tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Uji parsial Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (X2) terhadap PAD (Y), dengan hasil pengujian t-hitung sebesar $(9.558782) > (2,36462)$, dan nilai prob. sebesar $0.0001 < 0,05$, artinya Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Uji parsial Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (X3) terhadap PAD (Y), dengan hasil pengujian t-hitung sebesar $(-5.383462) < (2,36462)$, dan nilai prob. sebesar $0.0017 < 0,05$, artinya Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan pada uji simultan, dengan hasil pengujian F hitung $(84.75144) > F \text{ tabel } (4,74)$, dan nilai prob. $(0.000027) < (0,05)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Retribusi Jasa Umum di Kota Bandar Lampung tahun 2009-2018 secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji detreminasi menunjukkan bahwa determinasi Adjusted R-squared sebesar 0,965418 (96,54%). Berdasarkan hasil output tersebut maka variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 96,54%, sedangkan sisanya 3,46% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Sedangkan menurut pandangan Ekonomi islam Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk mencapai falah atau kesejahteraan bersama. Dengan menggunakan prinsip ekonomi yaitu, bertanggung jawab, adil, bekerjasama, jujur dan maslahat.

Kata Kunci : Retribusi Jasa Umum, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp: (0721) 703160

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**PENGARUH RETRIBUSI JASA UMUM
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KOTA BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2009-
2018**

Nama

Eka Fitri Febrianti

NPM

1551010031

Prodi

Ekonomi Syariah

Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Budinansyah, S.Th., M.Kom.I

Femei Purnamasari, S.E., M.Si

NIP. 97707252002121001

NIP. 198405212015032004

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.Si

NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721)-780887 Fax. (0721)-780422

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGARUH RETRIBUSI JASA UMUM
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR
LAMPUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN**

2009-2018, disusun oleh Eka Fitri Febrianti, NPM 1551010031, Jurusan

Ekonomi Syariah, diajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Februari 2020

Waktu : 15.00-17.00

Ruangan : Ruang Seminar 1

TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang : Dr. H. Nasrudin, M.Ag

Sekretaris : M. Iqbal Fasa, S.E.I., M.E.I

Penguji I : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si

Penguji II : Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag, M.Si.
NIP.1980080120031211001

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(Q.S At-Taubah : 60)¹

¹Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Dipanegoro,2010), h. 196

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, sehingga memberikan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, kasih dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan saya cintai yakni Ayahanda Sugeng Waluyo dan Ibunda Martilah dengan segenap jiwa raganya tiada lelah dan letih bahkan dengan sabar dan ikhlas membesarkan, membimbing, mendidik, memberikan nasihat dan limpahan do'a yang mengiringi setiap nafas untuk kebahagiaan dan keberhasilan anakmu ini. Semoga Allah senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT. dan menjadikan kalian termasuk kedalam golongan yang ada di barisan Nabi Muhammad SAW. kelak, Aamiin.
2. Adikku Eri Jufita Isnaini yang sangat kusayangi dan kucintai, yang selalu mendukung dan selalu menghujaniku dengan do'a sehingga menjadi semangat yang tiada henti untuk terus berjuang sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan semangat.
3. Almamater tercinta yang memberikan banyak ilmu pengetahuan rabbani dan Islami serta pengalaman yang tak ternilai harganya. Semoga UIN Raden Intan Lampung semakin melambung tinggi kejayaannya, berkualitas dan berintegritas.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENGARUH RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2009-2018”**, Shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang terang (ilmu pengetahuan) dengan akhlak yang mulia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan pada program Sarjana Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ekonomi Syari'ah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
2. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, yang selalu tanggap akan kesulitan mahasiswa.

3. Bapak Madnasir, S.E.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Budimansyah,S.Th.I.,M.Kom.I, selaku pembimbing I yang telah tulus meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memotivasi sehingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Femei Purnamasari,S.E.,M.Si, selaku pembimbing II yang sangat banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan arahan dengan sabar dalam membimbing serta memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Sahabat-sahabatku MbK Musdaria, Nurfaizah, Tia Asri Yolanda Sari, dan adik-adikku Samrotul Mufidah, Dwi Pangastuti yang selalu menghibur dan menyemangatiku, dan teman seperjuanganku Linda Melati Oktavia, Derista Rizkyani yang sudah seperti keluargaku sendiri, serta teman dekatku saat ini yaitu Dedi Andrianto yang selalu meluangkan waktunya untuk menghibur, memotivasi, menginspirasi dan yang selalu mendo'akanku hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat seperjuangan Ekonomi Islam angkatan 2015, terkhusus rekan-rekan Ekonomi Islam C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah membagi waktu dan memberikan motivasi penulis dalam menyusun skripsi ini hingga dapat terselesaikan. Semoga kita bisa menjadi Alumni yang bermanfaat yang dapat menanamkan nilai kebaikan atas ilmu yang kita dapatkan kepada masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar kita.

8. Para staf akademik dan kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulis menjadi mahasiswa, dan seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Pimpinan dan karyawan perpustakaan, baik perpustakaan pusat maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu memberikan informasi tentang referensi selama kuliah dan dalam proses skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang membantu sehingga skripsi ini selesai.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan selama ini dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangun sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung 23 Januari 2020
Penulis

Eka Fitri Febrianti
NPM. 1551010031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Batasan Masalah	20
E. Rumusan Masalah.....	20
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	21

BAB II KAJIAN TEORI..... 23

A. Kajian Teori.....	23
1. Pendapatan Asli Daerah.....	23
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	23
b. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	24
c. Pendapatan Asli Daerah Perspektif Islam	27
2. Retribusi Daerah	36
a. Pengertian Retribusi.....	36
b. Kriteria Retribusi Daerah	37
c. Prinsip dan Retribusi Daerah	46
3. Retribusi Jasa Umum	49
a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50

b. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	55
c. Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor .	60
B. Tinjauan Pustaka.....	63
C. Kerangka Pemikiran	69
D. Hipotesis	71
BAB III METODE PENELITIAN	78
A. Jenis dan Sifat Penelitian	78
B. Jenis dan Sumber Data.....	78
C. Teknik Pengumpulan Data.....	79
D. Populasi dan Sampel	81
E. Devinisi Variabel Penelitian	82
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	83
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	90
A. Hasil Penelitian	67
1. GambaranUmum Lokasi Penelitian	68
2. Profil Kota Bandar Lampung	73
3. Gambaran Umum Penelitian	90
B. Analisis Data.....	113
1. Hasl UjiAsumsiKlasik.....	113
2. Uji Hipotesis.....	121
C. Pembahasan	126
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	143

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti menguraikan pembahasan lebih lanjut, maka terlebih dahulu akan di jelaskan istilah yang ada dalam skripsi ini. Perlunya penjelasan istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca sehingga perlu adanya penegasan judul. Untuk menghindari kesalahan tersebut maka diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandar Lampung Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Periode 2009-2018”**. Adapun istilah-istilah yang dimaksud dalam proposal ini adalah :

1. Pengaruh

Pengaruh merupakan suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara suatu variabel dengan variabel lainnya.¹ Dengan kata lain masing-masing variabel akan saling berhubungan satu sama lain yang akan menghasilkan sesuatu yang baru yang saling mempengaruhi.

2. Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau

¹ Sugiono, *Penelitian Administratif*, (Bandung: Alfa Beta, 2001), h.4

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²

3. Jasa Umum

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.³

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan dan lain-lain.⁴

5. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu, yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.⁵

² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, (Jakarta: CV ANDI OFFSET, 2008), h. 15

³ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, Pasal 1

⁴ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah Di Indoneia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2013), h. 51-52

⁵ Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 249

6. Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai Al-Qur`an dan Sunnah.⁶

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandar Lampung di tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Periode 2009-2018”**.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan mendasar yang dijadikan untuk memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Seperti yang kita ketahui melalui data dari Dinas Pendapatan Daerah bahwa retribusi jasa umum bukanlah sumber utama dalam Pendapatan Asli daerah, akan tetapi retribusi jasa umum ini juga memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan adanya retribusi jasa umum, peneliti ingin menganalisis bagaimana pengaruh retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah pendapatan asli yang di dapat dari daerah itu sendiri dan dengan peraturan pemerintah daerah yang telah di tentukan.

⁶ Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.29

2. Alasan Subjektif

Alasan subjektif dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Judul yang di ajukan peneliti sesuai dengan spesialisasi keilmuan yaitu pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- b. Di dukung dengan tersedianya literature baik primer maupun sekunder serta adanya lokasi yang mudah di jangkau sehingga dapat menunjang penelitian ini.
- c. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang pengaruh Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung. Data yang di peroleh dalam penelitian ini berasal dari suatu lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu tahapan kegiatan menuju Indonesia yang lebih maju. Dalam pembangunan ini masyarakat beserta pemerintah mampu menjadikan Negara Indonesia yang lebih mandiri dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya. Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan sosial untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Pembangunan ialah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana untuk mencapai suatu

tujuan guna memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.⁷ Pembangunan ini dilakukan untuk memacu pemerataan pembangunan untuk meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup besar. Pembangunan umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit, pemakaman, kantor polisi di biayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak dan retribusi.

Pembagian daerah sendiri telah di atur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak yang asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.⁸ Pemerintah Indonesia memahami dalam memajukan negaranya, telah mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah yaitu untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka daerah di pacu untuk dapat mencari sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya memerlukan dukungan karena setiap tahunnya selalu meningkat, baik itu kegiatan rutin

⁷ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN,2010),h.373

⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah, Cetakan I*, (Bandung: Nusa Media,2009), h.78

maupun pembangunan di segala bidang, maka konsekuensinya Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan dana yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sumber-sumber penerimaan perlu ditingkatkan secara efisien dan efektif terutama sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik yang berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan dan Kekayaan Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah di kota Bandar Lampung sendiri pada tahun 2009-2018 atau selama sepuluh tahun terakhir relatif mengalami peningkatan, pada tahun 2016 pendapatan mengalami penurunan dan pada tahun 2018 juga mengalami penurunan. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami pertumbuhan pendapatan yang lumayan cukup besar. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Kota Bandar Lampung
Tahun 2009-2018

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Dalam Rupiah)
1	2009	72.009.309.841,70
2	2010	84.167.470.269,17
3	2011	156.796.491.183,50
4	2012	292.272.049.972,25
5	2013	418.111.740.815,52
6	2014	495.200.463.931,45
7	2015	769.108.142.606,24
8	2016	757.745.187.987,05
9	2017	994.795.696.600,00
10	2018	864.895.980.850,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2009-2018

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa Anggaran Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya relatif naik selama sepuluh tahun terakhir yaitu pada tahun 2009-2018. Data diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009 sampai pada tahun 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan, yaitu hanya sebesar 11.362.954.619,19. Sedangkan pada tahun 2017 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami peningkatan yaitu sebesar 273.050.508.613. Pada tahun 2018 anggaran yang diberikan pemerintah menurun yaitu hanya sebesar 864.895.980.850.00. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah naik turun terjadi karena penyumbang dana untuk pendapatan tersebut juga naik turun, seperti pendapatan yang diperoleh dari retribusinya.

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang di berikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.⁹ Sementara itu menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 64 yang di maksud dengan Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi jasa umum yang terdiri dari Retribusi

⁹ Marihot Pahala Siahian, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.4

Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parker Ditepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah daerah”.

Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang peranan dan kontribusinya sangat penting dalam menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi daerah tersebut yaitu retribusi jasa umum. Meskipun retribusi jasa umum ini bukan penerimaan retribusi yang utama, tetapi retribusi jasa umum di Kota Bandar Lampung memiliki peranan yang cukup penting, yaitu sebagai salah satu penyumbang khususnya dalam penerimaan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa umum, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.¹⁰ Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

adalah data-data realisasi dari Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung tahun 2009-2018.

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Baandar Lampung
Tahun 2009-2018

Nomor	Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Dalam Rupiah)
1	2009	85.626.773.522,08
2	2010	87.711.803.840,41
3	2011	162.772.590.331,88
4	2012	290.008.025.238,22
5	2013	359.625.018.287,61
6	2014	387.175.943.391,90
7	2015	397.547.326.856,39
8	2016	453.725.803.989,61
9	2017	512.809.680.623,87
10	2018	551.721.101.266,32

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2009-2018

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir. Realisasi dari Pendapatan Asli Daerah yang terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 85.626.773.522,08. Sedangkan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 551.721.101.266,32.

Pemerintahan dalam Islam mempunyai hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi masyarakatnya. Pemerintah berhak untuk mengawasi ataupun mengatur beberapa macam kegiatan ekonomi masyarakatnya yang dalam kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh masing-masing masyarakatnya. Tugas pemerintah terhadap masalah-

masalah perekonomian rakyat di jelaskan dalam firman Allah swt. Dalam surah Anisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa':59).¹¹

Berdasarkan ayat di atas maka dapat di simpulkan bahwa dalam hal aturan ataupun perekonomian dalam suatu pemerintahan sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an sebagai pedoman kita sebagai umat Islam yang beriman. Apabila dalam hal pemerintahan berbeda pendapat maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya karena itu akan lebih baik hasilnya.

Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu Kota Provinsi Lampung memiliki potensi yang cukup baik dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dimana sudah mulai berkembangnya peraturan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah. Dengan memiliki potensi daerah yang dapat digali, hal tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat di optimalkan oleh pemerintah daerah adalah hasil dari retribusi. Di

¹¹ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Dipanegoro, 2010), h.87

Kota Bandar Lampung sendiri retribusi terdiri dari berbagai dinas, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung khususnya pada retribusi jasa umum yang terdiri dari 3 item retribusi, yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Kota Bandar Lampung didalam pemerintahan daerah sudah memberikan sejumlah anggaran untuk Dinas Perhubungan khususnya pada retribusi jasa umum. Anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Anggaran Retribusi Jasa Umum
Kota Bandar Lampung
Tahun 2009-2018

Nomor	Tahun	Anggaran Retribusi Jasa Umum
1	2009	6.987.028.000,00
2	2010	3.075.307.500,00
3	2011	3.849.542.510,00
4	2012	8.004.466.186,25
5	2013	7.808.766.450,00
6	2014	8.608.760.000,00
7	2015	8.606.760.000,00
8	2016	8.606.760.000,00
9	2017	8.608.760.000,00
10	2018	8.566.626.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2009-2018

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat kita lihat bahwa anggaran untuk retribusi jasa umum yang diberikan pemerintah daerah relatif stabil setiap

tahunnya. Selama sepuluh tahun terakhir anggaran terkecil yang diberikan pemerintah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 3.075.307.500,00. Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya anggaran yang diberikan semakin meningkat dan semakin tahun relatif stabil seperti yang terlihat dalam tabel di atas.

Anggaran yang telah diberikan pemerintah daerah terhadap retribusi jasa umum di Kota Bandar Lampung selama sepuluh tahun terakhir yang terealisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Ralisasi Retribusi Jasa Umum
Kota Bandar Lampung
Tahun 2009-2018

Nomor	Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Umum (Dalam Rupiah)
1	2009	6.605.222.775,00
2	2010	2.935.333.000,00
3	2011	3.849.542.510,00
4	2012	5.488.302.720,00
5	2013	5.923.549.430,00
6	2014	6.451.468.170,00
7	2015	6.492.511.230,00
8	2016	5.000.812.640,00
9	2017	5.629.807.430,00
10	2018	5.389.397.460,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2009-2018

Berdasarkan tabel 1.4 diatas dapat kita lihat bahwa realisasi retribusi jasa umum setiap tahunnya tidak sama. Realisasi retribusi jasa umum yang terkecil terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 2.935.333.000,00. Sedangkan realisasi retribusi jasa umum yang terbesar dari tabel tersebut terjadi pada tahun 2009, yaitu sebesar 6.605.222.775,00.

Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung, yang berasal dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung bersumber dari retribusi jasa umum dimana retribusi ini terdiri dari tiga indikator yaitu, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung, anggaran untuk retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Bandar Lampung pada tahun 2009-2018, atau selama sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Kota Bandar Lampung
Tahun 2009-2018

Nomor	Tahun	Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1	2009	516.840.000,00
2	2010	6.000.000,00
3	2011	7.590.000,00
4	2012	8.349.000,00
5	2013	8.766.450,00
6	2014	8.760.000,00
7	2015	8.760.000,00
8	2016	8.760.000,00
9	2017	8.760.000,00
10	2018	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2009-2018

Tabel 1.5 diatas menjelaskan bahwa anggaran untuk retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Bandar Lampung relatif stabil setiap tahunnya. Selama sepuluh tahun terakhir anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu anggarannya sebesar 516.840.000,00. Sedangkan

pada tahun-tahun berikutnya anggaran mengalami peningkatan dan semakin tahun relatif stabil yaitu besar anggarannya sama yaitu sebesar 8.760.000,00.

Anggaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, selama sepuluh tahun terakhir yaitu pada tahun 2009-2018, di Kota Bandar Lampung dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Realisasi tersebut terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.6
Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Kota Bandar Lampung
Tahun 2009-2018

Nomor	Tahun	Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1	2009	441.664.700,00
2	2010	3.700.000,00
3	2011	6.000.000,00
4	2012	5.050.000,00
5	2013	5.450.000,00
6	2014	9.205.000,00
7	2015	8.775.000,00
8	2016	9.930.000,00
9	2017	0
10	2018	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2009-2018

Tabel 1.6 diatas menjelaskan tentang realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Bandar Lampung selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Dimana selama sepuluh tahun terakhir realisasi dari retribusi tersebut naik turun. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 441.664.700,00. Sedangkan realisasi terkecil terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 0, dimana artinya pada tahun 2017 tidak ada

realisasi dari retribusi pelayanan persmpahan/kebersihan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Anggaran untuk retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum selama sepuluh tahun terakhir yaitu pada tahun 2009-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
Kota Bandar Lampung
Tahun 2009-2018

Nomor	Tahun	Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
1	2009	1.400.000.000,00
2	2010	1.630.000.000,00
3	2011	2.277.058.500,00
4	2012	5.400.000.000,00
5	2013	6.000.000.000,00
6	2014	6.600.000.000,00
7	2015	6.600.000.000,00
8	2016	6.600.000.000,00
9	2017	6.600.000.000,00
10	2018	7.600.000.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2009-2018

Berdasarkan tabel 1.7 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa anggaran untuk pelayanan retribusi parkir pada sepuluh tahun terakhir di kota Bandar Lampung relatif stabil. Dimana hampir setiap tahunnya anggaran yang diberikan rata-rata sebesar 6.600.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2009 anggarannya hanya sebesar 1.400.000.000,00,yang artinya pada tahun berikutnya anggaran mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 anggaran yang diberikan sebesar 7.600.000.000,00. Dari data tesebut maka dapat dilihat bahwa anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2018.

Setiap anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah maka biasanya ada realisasi dari anggaran tersebut. Oleh karena itu, data realisasi dari anggaran retribusi pelayanan parkir tersebut selama sepuluh tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8
Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
Kota Bandar Lampung
Tahun 2009-2018

Nomor	Tahun	Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
1	2009	1.370.895.500,00
2	2010	1.520.247.000,00
3	2011	2.277.058.500,00
4	2012	3.890.489.000,00
5	2013	4.252.000.100,00
6	2014	4.925.028.400,00
7	2015	5.128.227.000,00
8	2016	4.306.501.000,00
9	2017	4.967.596.000,00
10	2018	4.775.470.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2009-2018

Tabel diatas menjelaskan bahwa, realisasi dari retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum pada tahun 2009-2018 mengalami kenaikan dan penurunan. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 5.128.227.000,00. Sedangkan realisasi terkecil terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 1.370.895.500,00. Kemudian, untuk tahun-tahun yang lainnya terjadi kenaikan dan penurunan meskipun naik turunnya realisasi tersebut nilainya tidak terlalu jauh.

Indikator yang terakhir dari retribusi jasa umum di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung tahun 2010-2018 adalah retribusi

pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Anggaran yang diberikan untuk retribusi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9
Anggaran Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Kota Bandar Lampung
Tahun 2009-2018

Nomor	Tahun	Anggaran Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
1	2009	1.400.000.000,00
2	2010	1.434.507.500,00
3	2011	1.563.374.500,00
4	2012	2.596.117.186,25
5	2013	1.800.000.000,00
6	2014	2.000.000.000,00
7	2015	2.000.000.000,00
8	2016	2.000.000.000,00
9	2017	2.000.000.000,00
10	2018	966.328.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2009-2018

Berdasarkan tabel 1.9 diatas, dapat dijelaskan bahwa anggaran untuk retribusi pelayanan pemgujian kendaraan bermotor selama sepuluh tahun terakhir mengalami kenaikan dan relatif stabil, dimana rata-rata anggarannya sebesar 2.000.000.000,00. Pada tahun 2009 anggarannya hanya sebesar 1.400.000.000,00, kemudian pada tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2018 anggarannya menurun, dimana besar anggaran tersebut hanya sebesar 966.328.000,00.

Realisasi dari anggaran retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor tersebut, selama sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.10
Realisasi Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Kota Bandar Lampung
Tahun 2009-2018

Nomor	Tahun	Realisasi Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
1	2009	1.284.328.725,00
2	2010	1.411.936.000,00
3	2011	1.563.374.010,00
4	2012	1.592.763.720,00
5	2013	1.666.099.330,00
6	2014	1.517.234.770,00
7	2015	1.355.295.230,00
8	2016	664.361.430,00
9	2017	662.211.430,00
10	2018	613.927.460,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2009-2018

Berdasarkan tabel 1.10 diatas maka dapat disimpulkan bahwa realisasi dari retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami kenaikan dan penurunan. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 1.666.099.330,00. Sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 613.927.460,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mengapa anggaran yang diberikan pada tahun 2018 menurun atau lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal itu di karenakan realisasi dari anggaran tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan.

Sejak zaman Rasulullah saw. pendapatan negara itu sudah ada diantaranya seperti zakat (pajak spiritual yang wajib bagi setiap muslim (fardhu 'ain) oleh karena itu penerimaan zakat cenderung lebih stabil yang akan menjamin program pengentasan kemiskinan dalam jangka

waktu yang panjang,¹² Kharaj yaitu sejumlah harta yang wajib dibayarkan kepada Negara atas hasil bumi, Jizyah yaitu pajak yang dibebankan oleh pemerintah islam pada kalangan non-muslim sebagai kompensasi untuk jaminan perlindungan jiwa, harta dan ibadah, Ushr yaitu pajak bea impor, Laba proyek umum, shadaqoh, wakaf, amwal fadilla (harta warisan yang tidak ada ahli waris), nawaib, Rikaz (harta temuan), Ghanimah, Fay'I (harta dari musuh saat perang), uang tebusan dan lain sebagainya.¹³ Pada saat itu semua pendapatan tersebut di jadikan untuk membiayai semua kegiatan wilayahnya untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk memperluas wilayah Islam. Sedangkan pada saat ini seperti yang kita ketahui bahwa sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, seperti pajak daerah dan retribusi daerah.

Otonomi daerah diperlukan adanya upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun retribusi jasa umum pada sepuluh tahun terakhir memberikan sumbangan yang cukup besar. Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa retribusi jasa umum di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung saat ini belum dapat berfungsi secara optimal jika dilihat dari penjelasan sebelumnya.

¹² Mustofa Edwin Nasution dan Yusuf Wibisono, *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2005), h.83

¹³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendidikan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.31

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah tersebut maka peneliti melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Asli Daerah dengan objek penelitian Kepala Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. Maka judul dari penelitian ini adalah Pengaruh Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung, di tinjau dari perspektif Ekonomi Islam, pada periode 2009-2018.

D. Batasan Masalah

Agar ruang lingkup pembahasan tidak melebar maka perlu adanya batasan masalah, adapun batasan-batasan tersebut sebagai berikut :

1. Penelitian ini akan di fokuskan pada pengaruh retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Pendapatan yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah pendapatan daerah yang di dapatkan dari retribusi jasa umum di Kota Bandar Lampung.
2. Responden dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah yang ada di Kota Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Retribusi Jasa Umum Secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung Periode 2009-2018?
2. Bagaimana pengaruh Retribusi Jasa Umum Secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung Periode 2009-2018 ?

3. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh indikator-indikator Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung Periode 2009-2018.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2009-2018.
- c. Untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi Instansi dan Akademisi, sebagai bahan masukan pemikiran mengenai permasalahan pengaruh retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam perspektif ekonomi Islam. Serta bagi pembaca di harapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi apabila melakukan penelitian yang sejenis.

b. Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi sumber informasi bagi Pemerintah Daerah di Kota Bandar Lampung agar mampu mengoptimalkan retribusi jasa umum untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara terus menerus, efisien dan efektif serta meningkatkan pengawasan terhadap tempat-tempat jasa umum. Dan untuk masyarakat agar dapat memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam perspektif Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah, yang memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi dari masing-masing daerah, kemudian digunakan kembali untuk pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan dan lain-lain.²

¹ Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.51

² Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), h. 101

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari potensi yang digali dari masing-masing daerah itu sendiri, yaitu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

1) Pajak Daerah

Perpajakan daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman.³

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk mengingatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Walaupun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Setiap daerah diberikan kewenangan atau peluang untuk menggali potensi yang dimiliki daerahnya sendiri dengan menetapkan jenis-jenis pajak selain yang telah ditetapkan, selama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

³ Raharjo Adisasmito, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 77

Jenis pajak daerah terbagi menjadi dua macam yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/Kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari :⁴

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air
- b) Balik nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air
- c) Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Jenis pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari :⁵

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalanan
- f) Pajak Parkir

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah seperti halnya pajak daerah yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

⁴ Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, Edisi Asli, (Jakarta : Penerbit MitraWacana Media, 2011), h.387-388

⁵ Ibid

Retribusi menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan bahwa retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.⁶

Retribusi daerah menurut Ahmad Yani adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁷

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang di Pisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup dagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba

⁶ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 tahun 2011, Tentang Retribusi jasa Umum

⁷ Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 63

atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.⁸

4) Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain yang Sah

Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

c. Pendapatan Asli daerah dalam Persepsi Islam

Islam merupakan sebagai ajaran yang lengkap. Islam memberikan petunjuk atas semua aktifitas manusia termasuk memberlakukan hukum-hukum atas segala sesuatu. Oleh karena

⁸ Pendaoatan Asli Daerah (PAD)” (On-Line), tersedia di: <https://www.kajianpustaka.com/2015/06/pendapatan-asli-daerah-pad.htm> (10 Oktober 2019)

itu, tujuan diturunkannya syari'at Islam adalah untuk mencapai falah (kesejahteraan) baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah sebagai lembaga yang menaungi masyarakat dalam sebuah lembaga haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk masyarakatnya.

Sumber-sumber penerimaan harta publik (baitulmal) dalam negara Islam di zaman Rasulullah Saw dan para Khalifah awal mencakup zakat, `usyr, khums, jizyah, dan kharaj serta fai'.⁹ Pendapatan Negara yang telah diterima kemudian di digunakan untuk biaya-biaya pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat sejahtera. Karena pada dasarnya suatu pemerintahan adalah amanah yang diberikan Allah swt. untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, seperti dalam firman Allah swt Surah An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang Memberi Pengajaran

⁹ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam :Prinsip Dasar*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2012), h, 253.

*kepadamu. Sunnguh, Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa:58)*¹⁰

Berdasarkan ayat di atas maka dapat di pahami bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menyampaikan segala amanat Allah maupun orang lain kepada yang berhak menerima amanat tersebut dengan adil, tidak diperbolehkan berbuat curang dalam menentukana suatu hukum. Untuk itu pemerintah daerah harus menjalankan amanahnya dengan adil terhadap masyarakatnya.

Berkaitan dengan pembiayaan pada sektor publik oleh Negara, ada beberapa sumber-sumber pendapatan Negara pada zaman Rasulullah Saw, an tara lain :

1) Zakat

Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan sumber daya manusia. Pada masa periode Mekah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran pribadi Muslim akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan dan kakafiran lainnya. Sedangkan pada periode Madinah, pungutan zakat menjadi wajib dan di

¹⁰ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Dipanegoro, 2010), h.87

ambil oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau petugas pemungut.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa zakat merupakan sebagian dari harta kita yang harus kita keluarkan untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan membebaskan hati dari sifat kefakiran. Dengan mengeluarkan zakat kita juga telah membantu orang lain yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah swt. Surah Al-Baqarah ayat 43, sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (Q.S Al-Baqarah :43)¹²

Dari ayat di atas dapat kita lihat bahwa Islam tidak hanya mewajibkan sholat, akan tetapi Islam juga mewajibkan zakat kepada orang-orang yang mampu untuk membayarnya. Selain itu, islam didirikan atas lima hal yaitu, Syahadat, Sholat, Puasa di bulan Ramadhan, Zakat, dan haji bila mampu.

¹¹ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012),h.24-25

¹² Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Dipanegoro, 2010), h. 7

2) 'Usyr

'Usyr berarti sepersepuluh dan merupakan pajak produk pertanian. Biasanya istilah tersebut digunakan untuk pengertian sedekah dan zakat, karena tidak ada garis pemisah antara keduanya didalam kitab-kitab Fiqih.¹³

Ushur adalah bea cukai, pajak yang dikenakan ketika barang-barang dibawa keluar atau masuk suatu wilayah Negara. Ilmu ekonomu modern mengatakan bahwa jika perdagangan antar Negara terjadi dengan bebas, tanpa pajak, maka kemakmuran semua Negara peserta dalam perdagangan akan meningkat.¹⁴

3) Kharaj

Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditakhlukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. Cara memungut kharaj terbagi dalam dua jenis yaitu menurut perbandingan (Muqasimah) yaitu ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu, sedangkan kharaj tetap (Wazifah) adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan.¹⁵

¹³ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi...*, h.258

¹⁴ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik...*, h.33

¹⁵ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:PT DANA BHAKTI WAKAF, 1997), h.250

Kharaj adalah pajak terhadap tanah atau jika di Indonesia sering disebut dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Terdapat perbedaan antara Kharaj dan PBB, yaitu jika Kharaj di tentukan berdasarkan tingkat produktifitas dari tanah (Land Productivity) bukan berdasarkan zoning.¹⁶

4) Khums

Al-khums berarti seperlima. Al-khums adalah bagian penerimaan Negara islam yang berasal dari rampasan perang yaitu objeknya berdasarkan ketentuan Al-qur'an. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah swt Q.S al-Anfal ayat 41, sebagai berikut :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَلِالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ
ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ
الْجَمْعَانِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

*Artinya: Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S Al-Anfaal : 41)*¹⁷

264 ¹⁶ Adiwarman Karim, Ekonomi Makro islam edisi ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), h.

¹⁷ Departemen Agama RI..., h.182

Para Ulama Syi'i mengatakan bahwa sumber pendapatan apapun harus dikenakan khums sebesar 20%, sedangkan Ulama Sunni beranggapan bahwa ini berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid menyatakan bahwa yang dimaksud Khums ini bukan hanya hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang.

5) Jizyah

Jizyah merupakan pungutan negara atas penduduk non-muslim, sebagai penyeimbang kewajiban muslim yang terkait kewajiban religius.¹⁸ Dengan kata lain jizyah ini sebagai imbalan untuk negaranya atas perlindungan terhadap harta dan nyawa warga non-muslim yang tinggal di wilayah Negara islam.

Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang-orang non muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara Islam. Sebagaimana dalam fiman Allah swt dalam Q.S At-Taubah ayat 29, sebagai berikut :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ

¹⁸ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik...*, h.36

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

صَغُرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (QS. At-Taubah : 29)¹⁹

6) Al-Fai'

Jika kaum muslimin menakhlukkan Negara musuh dengan kekuatan senjata, mereka memberi nama Fai' untuk mengekalkan pendapatan yang diperoleh sekali dan dikembalikan lagi setiap tahunnya. Istilah fai' di dalam Al-qur'an dan Sunnah secara eksklusif bagi perolehan perang – dalam bentuk tanah atau upeti atau ganti rugi-yang dipeoleh dari musuh yang telah menyerah sebelum berperang.²⁰

Pemungutan fai' dalam Negara Islam terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 6-7, sebagai berikut :

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ
وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ

¹⁹ Departemen Agama RI..., h.191

²⁰ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi...*, h. 263

الْقُرَىٰ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾

Artinya : Dan harta rampasan fa'I dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memeberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (6). Harta rampasan fa'I yang Diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang berada dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (Q.S Al-Hasyr:6-7)²¹

Disamping penerimaan pokok seperti yang telah di jelaskan diatas, Negara juga memiliki pendapatan yang bersumber dari pendapatan lainnya seperti wakaf (pemberian asset abadi dari rakyat untuk kebutuhan publik baik itu yang terbatas maupun yang tidak terbatas), kemudian ada khalalah (yaitu bagian Negara dari warisan), barang temuan, harta karun dan yang lainnya.

²¹ Departemen Agama RI..., h.546

B. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²²

Menurut Marihot P. Siahian, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun satu badan. Sedangkan menurut Ahmad Yani, daerah provinsi, kabupaten atau kota diberi peluang didalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan melalui menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan tersebut, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pihak yang berwenang kepada masyarakat baik pribadi maupun badan yang menggunakan fasilitas jasa atau suatu perizinan tertentu yang telah disediakan.

²² Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Pasal 1 ayat 26

2. Kriteria Retribusi Daerah

- a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
- c. Adanya prestasi langsung dari Negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa
- d. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum terkait dengan retribusi yang bersangkutan
- e. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.²³

3. Jenis-jenis Retribusi

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang menganut sistem closed list, menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi, kabupaten, dan kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis setelah diterbitkannya PP No. 97 Tahun 2012. Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.²⁴

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan

²³ Mardiasmo, h.127

²⁴ "Retribusi Daerah" (On-Line), Tersedia di: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/retribusi_daerah.pdf (23 September 2019)

dan kenmanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Umum:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSUD daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah (tidak termasuk pelayanan pendaftaran).
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, adalah pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, adalah pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil (akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warnanegara asing, dan akta kematian).

- 4) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, adalah pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran, pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, adalah pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh daerah.
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, adalah pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat

penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, adalah pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah; seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, adalah pungutan atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.
- 11) Retribusi Pengolah Limbah Cair, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah dari rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, adalah pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

15) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.

b. Retribusi jasa

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:²⁵

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, adalah pungutan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari

²⁵ Ibid.

tanah tersebut, misalnya pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.

- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan, adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan BUMD dan swasta.
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 4) Retribusi Terminal, adalah pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah tidak termasuk pelayanan peron. Dikecualikan dari objek retribusi terminal yaitu terminal yang disediakan dimiliki

dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir, adalah pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, dikecualikan dari objek retribusi tempat parkir khusus yaitu tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, adalah pungutan atas pelayanan tempat penginapan pesanggrahan villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh daerah, tidak termasuk atau dikecualikan retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa adalah yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan, adalah pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, adalah pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, adalah pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola daerah.
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air, adalah pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.
- 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah, adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dikecualikan dari objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- 3) Retribusi izin gangguan, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.
- 4) Retribusi izin trayek, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- 5) Retribusi izin usaha perikanan, adalah pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- 6) Retribusi perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Asing (IMTA), adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pemanfaatan hasil penerimaan dari masing-masing jenis retribusi daerah lebih diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan jenis layanan bersangkutan yang pengalokasiannya ditetapkan dengan Perda.

4. Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah

a. Tata cara Penarikan Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan. Hal itu berarti, seluruh proses pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran, dan penagihan retribusi.²⁶ Tatacara pemungutan retribusi daerah di atur Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009, yaitu :

1. Retribusi di pungut dengan menggunakan (Surat Tagih Retribusi Daerah) atau disingkat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

²⁶ Undang-Undang Lengkap Tahun 2011, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h.428

3. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tidak tepat waktu atau kurang dalam pembayarannya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi tersebut.
4. Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

b. Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Daerah Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi dibedakan berdasarkan golongan retribusi, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Penggolongan tersebut didasarkan pada jenis pelayanan dan perizinan. Pelayanan daerah dapat berupa pelayanan umum, yaitu pelayanan yang konsumsinya memberikan manfaat secara individu dan bermanfaat bagi masyarakat umum dan pelayanan yang bersifat privat berupa pelayanan yang ketersediaannya sangat terbatas oleh pihak swasta (jasa umum). Selengkapnya prinsip dan sasaran tarif adalah:²⁷

1) Tarif Retribusi Jasa Umum

Tarif ini ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan

²⁷ Ibid, h.430

tersebut. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

2) Tarif Retribusi Jasa Usaha

Tarif ini didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Tarif ini didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Beberapa pelayanan terhadap barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah lebih tepat apabila dibiayai melalui retribusi semakin dekat pelayanan tersebut ke dalam pengelompokan barang pribadi maka semakin tepat dibiayai melalui retribusi. Namun demikian, identifikasi batas antara barang publik dan pribadi agak sulit dilakukan dan pengelompokan harus berdasarkan pada tiap-tiap pelayanan.

Tarif retribusi dilihat kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran pendapatan tarif retribusi. Kewenangan daerah untuk melihat kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penetapan tarif tersebut di maksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi tersebut. Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 155 ditetapkan bahwa tarif retribusi dilihat kembali paling lama tiga tahun sekali. Peninjauan tarif ini dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

C. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum.²⁸ Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa umum memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

²⁸ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.²⁹

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang retribusi jasa umum di Dinas Perhubungan yang berada di kota Bandar Lampung, khususnya di bidang :

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

a. Pengertian Sampah

Definisi sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Sampah menurut

²⁹ Mardiasmo, h.13

Standar Nasional Indonesia No.19-3964-1994 adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang di anggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.³⁰

Hadiwiyoto mmenyatakan bahwa sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya atau karena pengolahan atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi ekonomis tidak adanya harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau gangguan kesehatan atau keestarian.³¹

Sampah merupakan limbah yang dihasilkan dari adanya aktivitas manusia. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari, sehingga pengelolaan sampah tidak terlepas dari pengelolaan gaya hidup masyarakat. Sampai saat ini permasalahan sampah belum tertangani dengan baik terutama di perkotaan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat

³⁰ I W. Wedana, *Manajemen Risiko Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli di Kabupaten Bangli 2013*, Jurnal Spektran.

³¹ Hadiwiyoto S, *Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta:INA:Yayasan Idaya,1983), h.12

mengubah perilaku masyarakat sesuai Undang-Undang No.18 Tahun 2008.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sampah adalah bekas atau sisa bahan, limbah, atau buangan yang bersifat padat yang terdiri dari bahan organik maupun anorganik setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari suatu kegiatan atau siklus kehidupan baik manusia, hewan maupun tumbuhan.

b. Jenis-jenis Sampah

1) Berdasarkan sumbernya

- a) Sampah alam
- b) Sampah manusia
- c) Sampah konsumsi
- d) Sampah nuklir
- e) Sampah industri
- f) Sampah pertambangan³²

2) Berdasarkan Sifatnya

- a) Sampah Organik (*degradable*)

Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk yang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, yaitu sebagai pupukkompos.

³²“Jenis Sampah yang harus diketahui” (On-Line), Tersedia di: <https://m.liputan6.com/citizen6/read/392824/2019/03/19/jenis-sampahyang-harus-diketahui-bisa-bantu-atasi-pencemaran-lingkungan> (07 November 2019)

b) Sampah Non Organik (*Undegradeble*)

Sampah non organik adalah sampah yang tidak dapat membusuk, tetapi dapat dimanfaatkan kembali seperti di daur ulang kembali.

3) Berdasarkan Bentuknya

- a) sampah padat
- b) sampah cair
- c) sampah alam
- d) sampah manusia
- e) sampah konsumsi³³

4) Dampak dari Sampah

- a) Dampak positif
 - (1) Penghematan sumber daya alam
 - (2) Penghematan energi
 - (3) Penghematan lahan TPA
 - (4) Lingkungan asri (bersih, sehat, nyaman)
- b) Dampak negatif
 - (1) Sumber penyakit
 - (2) Pencemaran lingkungan
 - (3) Menyebabkan banjir³⁴

³³Ibid.

³⁴Irawan, “Analisis Pengelolaan Sampah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Islam IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2016), h.33.

c. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

Adalah pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial. Subyek dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan persampahan /kebersihan.

Obyek dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan meliputi :

- 1) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA
- 2) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS.
- 3) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.
- 4) Pengadaan TPA.
- 5) Pengelolaan dan atau penmungutan sampah di TPA.

Pelayanan dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan meliputi :

- 1) Pelayanan kebersihan jalan umum.
- 2) Pelayanan kebersihan taman, ruangan tempat umum.

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume sampah.
- 2) Volume sampah dimaksudkan dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

2. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

a. Pengertian pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001, pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, maka penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengelolaan Parkir Ditepi Jalan Umum

Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Lingkup pekerjaan adalah penataan, penertib an, pembantu keamanan dan penarikan retribusi
- 2) Pengelola Parkir mempunyai ijin sebagai pengelola parkir

- 3) Kerjasama dilaksanakan dengan pihak lain, untuk badan usaha melampirkan akte pendirian, sedangkan Perorangan melampirkan identitas diri
- 4) Menyerahkan uang jaminan 10% dari harga lelang/tender yang dimenangkan sebelum SPK diserahkan
- 5) Daerah Kerja pihak lain adalah 1 (satu) rayon atau lebih
- 6) Pelelangan/penunjukan pihak lain dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota
- 7) Pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ketentuan teknis pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum diatur dengan Keputusan Walikota. Dalam melakukan usahanya, pengelola parkir mempunyai hak sebagai berikut :

- 1) Mengelola tempat lahan parkir yang ditentukan
- 2) Memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan petugas parkir sebesar 20% dari potensi pendapatan parkir
- 3) Mendapat perlindungan keamanan dari pemerintah terhadap kegiatan pengelolaan parkir illegal/tidak resmi.

Petugas Parkir mempunyai hak sebagai berikut :

- 1) Memperoleh penghasilan sebesar 25% dari potensi pendapatan parkir

- 2) Memungut retribusi parkir sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
- 3) Mendapat jaminan sosial dari pengelola parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Memperoleh pakaian seragam dan kelengkapannya.

Pengguna jasa parkir mempunyai hak sebagai berikut :

- 1) Memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir
- 2) Mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir
- 3) Mendapat perlindungan keamanan
- 4) Mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/ atau kerusakan yang dialami.

Dalam melakukan usahanya pengelola parkir mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- 1) Mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran lalulintas dikawasan lokasi parkir yang diusahakan
- 3) Menempatkan papan nama parkir di tempat/lokasi usahanya menurut ketentuan yang ditetapkan Walikota
- 4) Menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Walikota melalui dinas sebesar 40% dari jumlah potensi pendapatan parkir sesuai kontrak yang disepakati

- 5) Memungut tarif retribusi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
- 6) Memberikan seragam dan kelengkapannya kepada petugas parkir
- 7) Mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan/Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan
- 8) Memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya kepada pekerja atau Petugas Parkir sebesar 15 % dari potensi pendapatan parkir
- 9) Bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petugas Parkir mempunyai kewajiban :

- 1) Menyerahkan bukti retribusi parkir
- 2) Memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan baik
- 3) Memberikan perlindungan keamanan
- 4) Bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan
- 5) Memenuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku.

Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban :

- 1) Mentaati pola parkir yang sudah ditetapkan dalam rambu-rambu dan pembatas parkir
- 2) Membayar retribusi parkir

Obyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Sedangkan subyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

c. Pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini, meliputi :

- 1) Pengaturan
- 2) Penataan/penempatan
- 3) Penetiban
- 4) Kemudahan Informasi

d. Prinsip dan sasaran

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan serta mengatur keluar masuknya

kendaraan dan tempat parkir dan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan kemampuan masyarakat.

- 2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pengecatan pembatas parkir, rambu-rambu dan pemeliharaan, biaya operasional, penertiban, administrasi dan transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Pengertian pengujian kendaraan bermotor

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.³⁵

Retribusi pengujian kendaraan bermotor selanjutnya adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2002 Seri B, Nomor 5, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan dari serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis layak jalan.

³⁵ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2000, Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 1

Obyek retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Sedangkan subyek retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan.³⁶

b. Pelayanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi:

- 1) Pemeriksaan kondisi layak jalan
- 2) Pembuatan nomor izin
- 3) Pembuatan, pemasangan dan pengecatan tanda sampling
- 4) Penggantian Buku Uji
- 5) Kendaraan yang melakukan uji di luar atau mutasi uji.

c. Prinsip Dan Sasaran

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi:³⁷

- 1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembuatan nomor uji,

³⁶Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2000, Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Objek dan Subjek retribusi Pasal 3 dan 4

³⁷Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2000, Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 9

biaya pembuatan dan pemasangan serta pengecatan tanda samping.

- 3) Di samping biaya dimaksud ayat (2) Pasal ini dikenakan pula biaya penggantian tanda uji termasuk baut, kawat dan segel serta biaya penggantian buku uji berkala.

d. Penetapan Struktur Dan Besar Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Penetapan Struktur Dan Besar Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi:

- 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan JBB kendaraan bermotor kecuali kereta gandeng, kereta tempelan.
- 2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Tarif Retribusi Pengujian:
 - (1) Kendaraan Bermotor dengan JBB di bawah 2100 kg =
Rp 22.500,
 - (2) Kendaraan bermotor dengan JBB 2.101 Kg s/d 3.500 Kg = Rp 25.000,
 - (3) Kendaraan Bermotor dengan JBB 3.501 Kg s/d 8.000 Kg = Rp 28.500,
 - (4) JBB 8.001 Kg s/d 15.000 Kg = Rp 31.000,
 - (5) JBB di atas 15.000 Kg = Rp 34.000,
 - (6) Kereta Gandengan = Rp 35.000,

(7) Kereta Tempel = Rp 40.000,

- b) Penggantian tanda uji berkala
- c) Penggantian buku uji
- d) Kendaraan yang melakukan uji di luar daerah atau mutasi dikenakan penambahan biaya rumah tangga numpang uji di luar rumah tangga tersebut huruf a ayat ini Rp 10.000.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada.³⁸ Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian yang sudah ada. Penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul yang di angkat berhubungan dengan pengaruh retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah, sehingga dapat di gunakan sebagai bahan acuan dan masukan dalam penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Stephanny Inigama Timisela, Meinarni Asnawi, Yundi Hafizrianda dengan judul “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura”. Metode yang digunakan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis penerimaan daerah Kota Jayapura yang bersumber dari retribusi parkir tepi jalan umum dengan

³⁸ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta:Rineka Cipta,2000), h.75

tipe penelitian timeseries. Sedangkan metode kualitatif untuk menganalisis sifat deskriptif analitik terhadap data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, pemotretan, analisis dokumen dan lain-lain yang tidak dituangkan dalam angka. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 36 lokasi parkir tepi jalan umum. Penelitian ini menggunakan empat distrik dengan perumusan pengambilan sampel masing-masing distrik menggunakan teknik Stratified Random. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan.³⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Jayapura mengalami kondisi yang kurang efektif, dimana berdasarkan informasi kualitatif menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Jayapura masih jauh dari nilai penetapan target tahunan. Kondisi tidak optimal dalam pengelolaan potensi daerah terlihat dari rata-rata selama 11 tahun (2005-2015) hanya sebesar Rp 773 juta.⁴⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Widya Putri dengan judul “Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan menggunakan data sekunder berupa

³⁹Stephanny Inigama Timisela, Meinarni Asnawi, Yundi Hafizrianda, *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura*, Jurnal Kedua Vol.2 No.1, ISSN 2477-7838, h. 8

⁴⁰Ibid.h.12

data realisasi dan target PAD periode 2010-2014, realisasi dan target retribusi parkir periode 2010-2014, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum serta Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Hasil dari penelitian ini adalah kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Malang selama periode 2010-2014 mengalami fluktuasi. Dimana semakin tinggi realisasi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah maka kontribusinya akan semakin kecil begitu juga dengan sebaliknya, semakin rendah kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah maka kontribusinya akan semakin besar.⁴¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ina Anikmah dengan judul “Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam” Studi pada Kota Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field Reseach*), dimana peneliti mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena atau kejadian keadaan yang alamiah, dengan tujuan untuk untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam perspektif ekonomi islam melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan retribusi parkir di Kota Tegal sudah menerapkan prinsip Ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya baik dari

⁴¹ Rahmawati Widya Putri, *Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, ISSN (P) 2086-1575 E-ISSN 2502-7115, JESP-Vol.8, No 1 Maret 2016, (Malang: 2016), h.26

penetapan tariff, pungutan retribusi parkir sudah sesuai dengan aspek keadilan.⁴²

4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nopiyah Sari, dengan judul Analisis Optimalkan Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Palembang” Tahun 2016. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.⁴³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Palembang adalah dengan cara memperluas basis penerimaan yang terdiri dari mengevaluasi tarif penerimaan. Pemerintah kota Palembang dalam menentukan tarif penerimaan retribusi sudah sesuai dengan perda, dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menguji ker sudah baik, prosedur pun sudah dilakukan cukup mudah dan sederhana,serta pelayanannya efektif. Hanya saja tingkat kesadaran masyarakat untuk menguji ker yang masih terbilang rendah.⁴⁴
5. Penelitian yang di lakukan oleh Isti Dwi Utami dan Dewi Kusuma Wardani, dengan judul “Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul”, Tahun 2014.

⁴² Ina Anikmah, *Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kota Tegal)*, (Purwokerto:2016), h.29

⁴³Nopiyah Sari, dengan judul :Analisis Optimalkan Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Palembang” Tahun 2016, h.29.

⁴⁴Ibid.h.63.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan sumber lainnya secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Hasil penelitian ini adalah secara simultan Pajak Reklame dan Retribusi Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan pada uji parsial Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun Retribusi Parkir berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini yang paling dominan adalah retribusi parkir.⁴⁵

6. Penelitian yang dilakukan oleh Semdi J.E. Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, dan Willy Tri Hardianto, dengan judul “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah” di Kota Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melaksanakan pengkajian data deskriptif. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Hasil dari penelitian ini adalah retribusi parkir di Kota Batu pada 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2009-2011 rata-rata memberikan kontribusi sebesar 1,49% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batu setiap tahunnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontribusi yang diberikan retribusi parkir terhadap

⁴⁵ Isti Dwi Utami dan Dewi Kusuma Wardani, *Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul*, ISBN:978-602-70429-2-6, Seminar Nasional Dan Call Paper, 25 Juni 2014, (Yogyakarta:2014), H.481

Pendapatan Asli Daerah Kota Batu masih sangat kurang,, karena masih dalam rasio 0,00-10,00%.⁴⁶

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan seperti yang dijelaskan di atas, maka terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti. Adapun perbedaan dan persamaan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini

NO	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Periode 2010-2014 Oleh: Rahmawati Widya Putri	Penelitian saat ini variabel Xnya adalah Retribusi Jasa Umum, kemudian dilihat dari perspektif Ekonomi Islam, dan perbedaan waktu serta tempat penelitian	Variabel Ynya adalah Pendapatan Asli Daerah
2	Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam” Studi	Penelitian saat ini variabel Xnya adalah Retribusi Jasa Umum sedangkan penelitian terdahulu	Variabel Ynya adalah Pendapatan Asli Daerah, dan sama-sama di lihat dari perspektif Ekonomi Islam

⁴⁶ Semdi J.E. Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, dan Willy Tri Hardianto, *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISSN.2088-7469, Vol.1, No 2 (2012), h. 23

	pada Kota Tegal Oleh: Ina Anikmah	pengelolaan retribusi parkir, tempat dan tahun penelitian	
3	Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Oleh: Isti Dwi Utami dan Dewi Kusuma Wardani	Penelitian saat ini di lihat dari perspektif Ekonomi Islam, tempat dan tahun penelitian berbeda	Variabel Ynya adalah Pendapatan Asli Daerah
4	Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Oleh: Semdi J.E. Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, dan Willy Tri Hardianto	Kebijakan Retribusi Parkir, Tempat Penelitian dan penelitian saat ini dilihat dari perspektif Ekonomi Islam	Variabel Ynya Pendapatan Asli Daerah
5	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura Oleh: Stephanny Inigama Timisela, Meinarni Asnawi, Yundi Hafizrianda	Penelitian saat ini dilihat dari perspektif ekonomi islam serta tempat dan waktu yang berbeda	Variaabel Ynya Penerimaan daerah

6	Analisis Optimalkan Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Palembang” Tahun 2016 Oleh: Nopiyah Sari	Penelitian saat ini dilihat dari perspektif ekonomi islam serta tempat dan waktu yang berbeda	Variabel Ynya Penerimaan daerah
---	---	--	------------------------------------

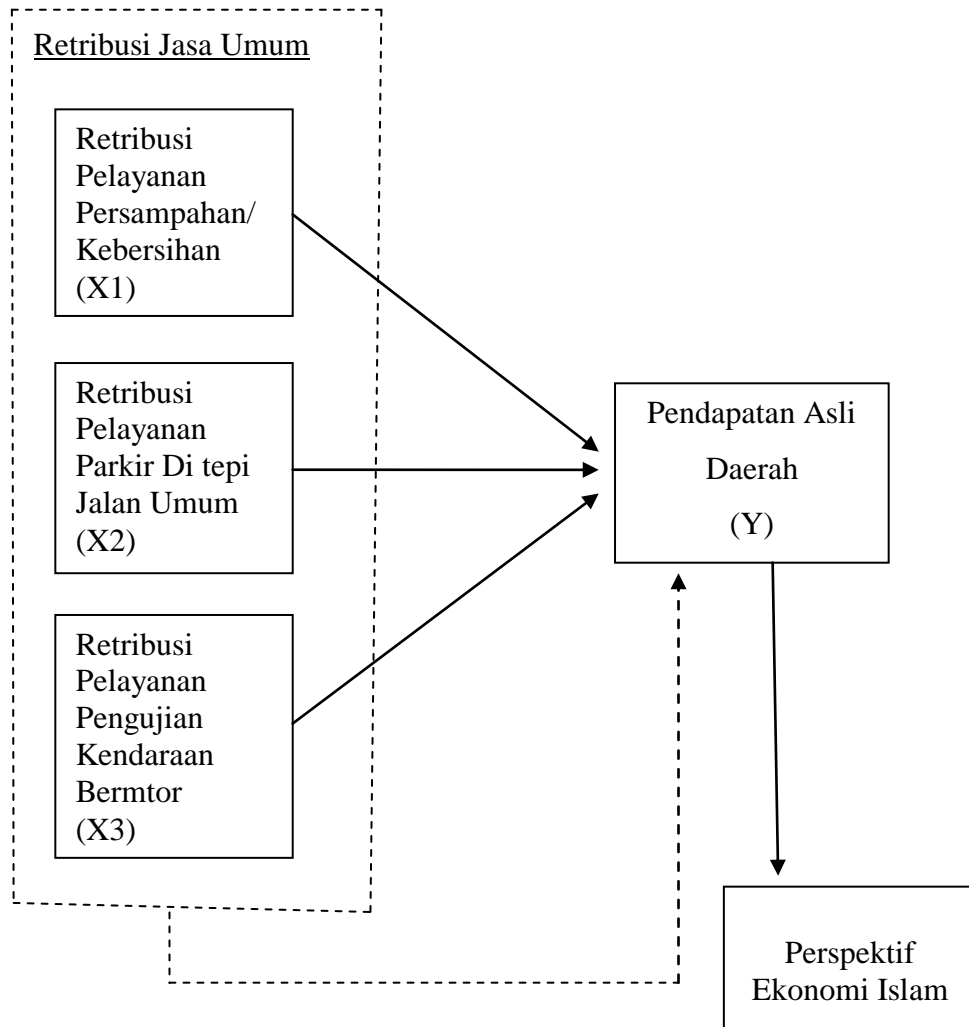
E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi dengan masalah yang penting. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga perlu digali potensi-potensi tersebut. Berdasarkan landasan teori pada bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian terdahulu apabila pendapatan dari hasil retribusi daerah meningkat setiap tahunnya maka akan mempengaruhi pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Meningkatnya hasil retribusi tersebut maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat, meskipun retribusi ini bukan penyumbang utama dalam pendapatan daerah akan tetapi retribusi ini memberikan sumbangan dana untuk daerahnya.

Kota Bandar Lampung memiliki banyak potensi sebagai pendapatan untuk daerahnya sendiri. Salah satunya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah ini memiliki beberapa jenis, diantaranya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Semakin besar

pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor maka akan semakin meningkat Retribusi Jasa Umumnya. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam penelitian ini peneliti akan membahas pengaruh retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah dalam perspektif ekonomi Islam yang berada di kota Bandar Lampung Tahun 2009-2018. Berdasarkan asumsi diatas maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Secara Simultan -----

Secara Parsial _____

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian biasanya di susun dalam bentuk kalimat tanya. Dikatakan jawaban sementra karena

jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang sesuai, belum berdasarkan pada bukti-bukti empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum menjadi jawaban yang empirik.⁴⁷

Uji statistik T atau uji parsial merupakan metode pengujian koefisien regresi untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dimana yang menjadi variabel independen adalah retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan yang menjadi variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah. Sama halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan dalam uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengelolaan data melalui program Eviews.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum.⁴⁸ Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

⁴⁷ Sugiyono, *Penelitian Administratif* (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 55

⁴⁸ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009-2018

Pada dasarnya setiap daerah memiliki potensi masing-masing yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Yasniva, Abu bakarhamzah, Sofyan Syahnur menjelaskan bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan bagian dari retribusi jasa umum yang dikelola oleh pemerintah daerah. Potensi dari retribusi pelayanan persampahan ini memang memberikan sumbangan dana terhadap pendapatan asli daerah meskipun tidak terlalu besar. Maka dapat dikatakan bahwa jika semakin banyak potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, kemudian diolah oleh pemerintah daerah maka potensi-potensi tersebut dapat menjadi pendapatan untuk daerahnya itu sendiri. Sehingga pemerintah daerah tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah bisa mengoptimalkan sumber-sumber pendapatann daerah tersebut untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.

Dari penjelasan di atas maka dapat di simpulkan hipotesisnya sebagai berikut:

- a. H_0 : Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Periode 2009-2018.

- b. H_a : Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Periode 2009-2018.

2. Pengaruh Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009-2018

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Stephanny Inagama Timisela, Meinarni Asnawi, dan Yundi Hafizrianda menjelaskan bahwa retribusi parkir ditepi jalan umum merupakan salah satu potensi yang memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah, meskipun sumbangan tersebut belum optimal pengaruhnya namun retribusi ini sudah ikut serta memberikan seumbangan terhadap daerahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Jayapura mengalami kondisi yang kurang efektif, dimana berdasarkan informasi kualitatif menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Jayapura masih jauh dari nilai penetapan target tahunan. Kondisi tidak optimal dalam pengelolaan potensi daerah terlihat dari rata-rata selama 11 tahun (2005-2015) hanya sebesar Rp 773 juta.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- a. H_o : Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Periode 2009-2018.

- b. Ha : Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Periode 2009-2018.

3. Pengaruh Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009-2018

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Nopiyah tahun (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Palembang adalah dengan cara memperluas basis penerimaan yang terdiri dari mengevaluasi tarif penerimaan. Pemerintah kota Palembang dalam menentukan tarif penerimaan retribusi sudah sesuai dengan perda, dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menguji ker sudah baik, prosedur pun sudah dilakukan cukup mudah dan sederhana, serta pelayanannya efektif. Hanya saja tingkat kesadaran masyarakat untuk menguji ker yang masih terbilang rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Optimalkan Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Palembang” Tahun 2016 berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat di buat hipotesis sebagai berikut:

- a. H_0 : Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Periode 2009-2018.
- b. H_a : Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Periode 2009-2018.

4. Pengaruh Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2018

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gozzali Ar-Rozzaq (2010) menjelaskan bahwa terdapat kontribusi yang cukup kuat secara keseluruhan terhadap pendapatan asli daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi jasa umum memberikan sumbangan dana cukup besar terhadap pendapatan asli daerah, dimana retribusi tersebut didapat dari seluruh retribusi jasa umum sehingga penerimaan retribusi cukup besar peranannya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat di baut hipotesis sebagai berikut:

- a. H_0 : Retribusi Jasa Umum Tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Periode 2009-2018 secara simultan.
- b. H_a : Retribusi Jasa Umum berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Periode 2009-2018 secara simultan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT DANA BHAKTI WAKAF, 1997.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro islam edisi ke-3*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah Di Indoneia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2013.
- A. W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Dipanegoro, 2010.
- Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Ramayana Pers dan STAIN Metro 2008.
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendidikan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Hadiwiyoto S, *Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta: INA:Yayasan Idaya, 1983.
- Ina Anikmah, *Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kota Tegal)*, (Purwokerto: 2016)
- Irawan, *"Analisis Pengelolaan Sampah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam"*, Skripsi Program Sarjana Ekonomi Islam IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2016
- Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Isti Dwi Utami dan Dewi Kusuma Wardani, *Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul*, ISBN:978-602-70429-2-6, Seminar Nasional Dan Call Paper, 25 Juni 2014, Yogyakarta:2014

I W. Wedana, *Manajemen Risiko Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli di Kabupaten Bangli 2013*, Jurnal Spektran.

Jenis Sampah yang harus Diketahui (On-Line), Tersedia di: <https://m.liputan6.com/citizen6/read/392824/2019/03/19/jenis-sampah-yang-harus-diketahui-bisa-bantu-atasi-pencemaran-lingkungan> (07 November 2019)

Koentjoroningrat, *Metode penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 2011.

Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2010.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, Jakarta: CV ANDI OFFSET, 2008.

Marihot Pahala Siahian, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam :Prinsip Dasar*, Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2012.

Mustofa Edwin Nasution dan Yusuf Wibisono, *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers 2005.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah, Cetakan I*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Nopiyah Sari, dengan judul “*Analisis Optimalkan Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Palembang*” Tahun 2016.

Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (On-Line), tersedia di: <https://www.kajianpustaka.com/2015/06/pendapatan-asli-daerah-pad.htm> (10 Oktober 2019)

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2000, Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 1,3,4 dan 9.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 tahun 2011, Tentang Retribusi jasa Umum.

Raharjo Adisasmito, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.

Rahmawati Widya Putri, *Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, ISSN (P) 2086-1575 E-ISSN 2502-7115, JESP-Vol.8, No 1 Maret 2016, (Malang: 2016)

Retribusi Daerah” (On-Line), Tersedia di:
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2018/08/retribusi_daerah.pdf (23 September 2019)

Rohmad, Suprayitno, *Pengantar Statistik*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015

Semdi J.E. Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, dan Willy Tri Hardianto, *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, ISSN.2088-7469, Vol.1, No 2 (2012)

Stephanny Inigama Timisela, Meinarni Asnawi, Yundi Hafizrianda, *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura*, *Jurnal Kedua* Vol.2 No.1, ISSN 2477-7838, h. 8

Sudjana, *Metode Statistik*, Bandung: PT.Tarsito,2009.

Sugiono, *Penelitian Administratif*, Bandung: Alfa Beta, 2001

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2011

Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung:Alfabeta,2012

Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta, 2000

Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

Sutrisno Hadi, *Metode research*, Yogyakarta: ANDI, 2002

Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, Edisi Asli, (Jakarta : Penerbit MitraWacana Media, 2011.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Pasal 1 ayat 26.

Undang-Undang Lengkap Tahun 2011, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Usman, Husaini, dan Setiadi, *Pengantar Statistika*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015.